

**RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN
SUMEDANG BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu & Capaian Renstra PD
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
BAB V	PENUTUP
	LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022, telah selesai kami susun.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2020 ini berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menetapkan dokumen yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021 dengan tujuannya untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang selama tahun 2012.

Akhir kata, Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

Sumedang, 2021
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang

Drs. H. ASEP TATANG SUJANA., M.Si
NIP. 19660228 199901 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja -SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja - SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2022 merupakan Rencana Kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2022 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
 23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

- Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
32. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor);
 33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
 35. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
 36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 37. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

38. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);
40. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 113);
41. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 111);
42. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor ...).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Menjadi acuan bagi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumem Pelaksanan Anggaran (DPA) serta pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022;
- Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
- Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kesbangpol Kabupaten Sumedang Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Kesatuan bangsa dan Politik merupakan rencana kerja dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan bangsa dan Politik 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang 2018-2023 yaitu penjabaran dari capaian-capaian sasaran yang ditargetkan dalam RPJMD dijabarkan ke dalam program dan kegiatan Badan Kesatuan bangsa dan Politik selama lima tahun. Disamping itu dalam kerangka pembangunan tahun 2022, maka program dan kegiatan yang direncanakan merupakan bagian dari agenda perwujudan pemerintahan demokratis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Umum di bidang Kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku

Bedasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 Pelaksanaan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung Terdiri dari Belanja Urusan PD dan Belanja Lansung Urusan Wajib (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya, dapat dilihat pada lampiran I .

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021
KABUPATEN SUMEDANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun lalu (n2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD (n-1)	Pertiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
Sebelum Perubahan RENSTRA PD Permendagri 13 Tahun 2006										
5.01.5.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi PerBadanan	Pelayanan Administrasi perBadanan								
5.01.5.01.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100			
5.01.5.01.01.01.01.003.	Penyediaan Pelayanan Administrasi PerBadanan	Jumlah pelayanan administrasi perBadanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100			
5.01.5.01.01.01.01.005.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100			

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.01.5.01.01.01.006.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100			
5.01.5.01.01.01.007.	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	100			
5.01.5.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	14 Orang	20 orang	14 Orang	20 orang	143			
5.01.5.01.01.01.012.	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah Orang Jasa Kebersihan	3 orang	2 orang	3 orang	2	67			
5.01.5.01.01.01.01.023	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Sistem Informasi Perangkat Daerah yang online	1 kali	1 kali	1 kali					
5.01.5.01.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
5.01.5.01.01.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Badan	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Badan	10 jenis	10 jenis	10 jenis	Alat Listrik - 20 jenis Alat Pembersih - 43 Jenis Tabung gas - 12 Kali Ac - 1 Paket Alat dapur - 8 Jenis Scarer - 1 Buah Smart Phone - 2 Unit				

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.01.5.01.01.01.02.008.	Penetaan Halaman Badan Gedung Badan	Halaman Badan yang ditata		1 Paket						
5.01.5.01.01.01.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional yang di pelhara	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	100			
5.01.5.01.01.01.02.015.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Badan/Gedung Badan	Perlengkapan dan Peralatan Badan/Gedung Badan yang dipelihara	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100			
5.01.5.01.01.01.02.019.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Badan	Gedung Badan yang ditata	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100			
5.01.5.01.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
5.01.5.01.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100			
5.01.5.01.01.01.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100			
5.01.5.01.01.01.07.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran								
5.01.5.01.01.01.07.001.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen	9 dokumen	7 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100			

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.01.5.01.01.01.08.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD								
5.01.5.01.01.01.08.001.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Data Kepegawaian yang dikelola	4 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100			
5.01.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
5.01.01.5.01.01.01.15.	Program Pengembangan, Pemantapan dan Penguatan Ideologi Masyarakat dan Wawasan Kebangsaan	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100%	100%	100%					
5.01.01.5.01.01.01.15.001.	Bimbingan Teknis Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta	200 orang		50 orang					
5.01.01.5.01.01.01.15.002.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Bela Negara	Jumlah Peserta	700 orang	120 orang	130 orang					
5.01.01.5.01.01.01.15.003.	Jambore Kebangsaan	Jumlah Peserta	1200 orang	200 orang	230 orang					
5.01.01.5.01.01.01.15.004.	Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah rakor	12 kali	54 SKPD	1 kali					

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.01.01.5.01.01.01.15.00	Pembentukan Model Kelurahan Pembauran Kebangsaan	Jumlah Model	7 Kelurahan	40 orang	1 Kelurahan					
5.01.01.5.01.01.01.15.00	Kemah Pembauran Kebangsaan	Jumlah Peserta	560 orang	100 Orang	100 orang					
5.01.01.5.01.01.01.15.00	Peningkatan Karakter Bangsa	Jumlah Peserta	600 orang		150 orang					
5.01.01.5.01.01.01.15.00	Penyelenggaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Bela Negara	Jumlah Upacara	2 kali		2 kali					
5.01.01.5.01.01.01.15.00	Penyelenggaraan Upacara Hari Anti Narkoba (HANI)	Jumlah Upacara	1 kali		1 kali					
5.01.01.5.01.01.01.16.00	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1. Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politik	4.050		2.100					
		2. Persentase Ormas yang di bina	50 %		47,14%					
5.01.01.5.01.01.01.16.00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	1. Jumlah Peserta 2. Jumlah Rekomendasi Partai Politik	20 Orang dan 13 Rekomendasi Partai Politik	20 Orang dan 10 Rekomendasi Partai Politik	20 Orang dan 13 Rekomendasi Partai Politik	20 Orang dan 13 Rekomendasi Partai Politik		100		
5.01.01.5.01.01.01.16.00	Kemitraan Partai Politik	Jumlah Peserta Partai Politik	16 Partai Politik		16 Partai Politik					
5.01.01.5.01.01.01.16.00	Stabilitas Politik Daerah	Jumlah rapat	12 kali		12 kali					
5.01.01.5.01.01.01.16.00	Penyelenggaraan Pendidikan Politik	Jumlah Orang	2475 orang	175 Pemilih Pemula, 175 Tokoh Pemuda, 175 Kaum disabilitas Marjinal	525 Orang					

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.01.01.5.01.01.16.00 5.	Penyusunan Model Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah model	3 model		1 model					
5.01.01.5.01.01.16.00 6.	Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	1. Jumlah Ormas yang diawasi 2. Jumlah Ormas yang divalidasi 3. Jumlah Ormas yang di bina	206 ormas	186 Ormas	191 ormas	190 ormas	99			
5.01.01.5.01.01.16.00 7.	Pelayanan Organisasi Masyarakat	Jumlah Ormas dan database ormas	206 Ormas dan 1 Database		191 Ormas dan 1 Database	190 ormas	100			
5.01.01.5.01.01.16.00 8.	Peningkatan Rasa Kepedulian Sosial Ormas dalam Kehidupan Berbangsa dan Berregara	Jumlah Ormas	75 Ormas	100 Ormas	190 Ormas	190 ormas				
5.01.01.5.01.01.16.01 0.	Sosialisasi Peraturan Tentang Pemilihan Umum	Jumlah Orang	2100 orang	300 orang	100 orang					
5.01.01.5.01.01.17.	Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkrup (Sosial Politik, ekonomi dan Budaya)	100%		100%					
5.01.01.5.01.01.17.00 1.	Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA	Jumlah Orang	200 Orang		50 Orang					
5.01.01.5.01.01.17.00 2.	Tes Narkoba bagi Aparatur	Jumlah aparaturn	465 orang	210 orang	100 orang					
5.01.01.5.01.01.17.00 3.	Pembentukan Kader Pencegahan, Pemberantasan, Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Pemuda Pelopor Narkotika	Jumlah orang yang dibina menjadi kader dan pemuda pelopor anti narkotika	1108 orang		277 orang					

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.01.01.5.01.01.01.17.00	Satgas Narkotika	Jumlah Satgas	277 Orang		69 Orang					
4.	Desa Bersinar	Jumlah Desa	1 desa		1 desa					
5.01.01.5.01.01.01.17.00										
5.	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Jumlah Peserta	100 Orang		100 Orang					
5.01.01.5.01.01.01.17.00										
6.	Perda Narkotika	Jumlah Perda	1 Dokumen		1 Dokumen					
5.01.01.5.01.01.01.17.00										
7.										
5.01.01.5.01.01.01.18.	Program Kewaspadaan Nasional	Persentase potensi konflik tidak menjadi Kewaspadaan Nasional	100%		100%					
5.01.01.5.01.01.01.18.00	Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat terhadap Gangguan HAM	Jumlah orang	400 Orang		100 Orang					
1.										
5.01.01.5.01.01.01.18.00	Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah	Jumlah rapat	12 Kali	6 Kali	12 Kali	12 Kali		100		
		Penguatan Jaringan	6 Kali	5 Kali	6 Kali	6 Kali		100		
5.01.01.5.01.01.01.18.00	Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Hari-hari Besar Keagamaan	Jumlah Pengamanan Hari-Hari Besar Keagamaan	8 Hari Besar keagamaan	2 Hari Besar keagamaan	8 Hari Besar keagamaan	2 Hari Besar keagamaan		25,00		
3.										
5.01.01.5.01.01.01.18.00	Pemantauan Orang Asing	Jumlah Orang asing / Perusahaan	30 Perusahaan	24 Perusahaan	30 Perusahaan	30 Perusahaan		100		
4										

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.01.01.5.01.01.01.18.00	Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rencana Aksi Terpadu	15 Rencana aksi	15 Rencana aksi	15 Rencana aksi	15 Rencana aksi	100			
5.01.01.5.01.01.01.18.00	Bimbingan Teknis Intelijen	Jumlah orang	275 orang	55 Orang	55 Orang					
5.01.01.5.01.01.01.18.00	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	Jumlah Rapat	12 Kali	11 kali	12 Kali	12 Kali	100			
5.01.01.5.01.01.01.18.00	Penyelenggaraan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah	Jumlah Pengawalan dan Pengamanan	12 Bulan		12 Bulan					
5.01.01.5.01.01.01.18.00	Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) PILKADES	Jumlah Desa yang Mengadakan Pilkades	88 Desa		88 Desa	88 Desa	100			
5.01.01.5.01.01.01.18.01	Penyelenggaraan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini (Puskomin)	Jumlah Rakor	12 Bulan		12 Bulan					
5.01.01.5.01.01.01.19.	Program Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Konlik Sara dan Keagamaan	0		0					
5.01.01.5.01.01.01.19.00	Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Peserta Forum	4 Kali		4 Kali	200orang				
5.01.01.5.01.01.01.19.00	Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan	Jumlah Kelompok / Aliran yang di awasi	100 Orang		100 Orang					
5.01.01.5.01.01.01.19.00	Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Keagamaan (Guru Ngaji, Marbot,)	Jumlah kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya	200 Orang		200 Orang	30 orang	15,00			
5.01.01.5.01.01.01.19.00	Survei Index Kerukunan Umat Beragama	Tingkat Kerukunan	74,5		73	-	-			

	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (PD) (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun lalu (n2)	Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	
Sesudah Perubahan RENSTRA PD Permendagri 90 Tahun 2019											
X	XX	01	2.01	0	1	0	0	0	13	11 Dokumen	
									Dokumen		
X	XX	01	2.01	0	1	0	0	0	3	3 dokumen	
									Dokumen		
X	XX	01	2.01	0	2	0	0	0	1	1 dokumen	
									dokumen		

1			2			3			4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X	XX	01	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD								1 dokumen		
X	XX	01	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD								1 dokumen	1 dokumen	
X	XX	01	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA - SKPD								1 dokumen		
X	XX	01	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								6 dokumen	6 dokumen	
X	XX	01	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang gtertb dan sesuai peraturan perundang-undangan								100%	50%	
X	XX	01	2.02	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								15 org	15 org	
X	XX	01	2.02	0	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								1 dok		
X	XX	01	2.02	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an/Akhir Tahun SKPD								12 dok	6 dok	
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai								100%	50%	

	1			2			3			4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X	XX	01	2.05	0	Pengadaan Pakaiannya Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaiannya Beserta Atribut Kelengkapannya								32 stel			
X	XX	01	2.05	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian								32 orang	32 orang		
X	XX	01	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai								100%			
X	XX	01	2.06	0	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Badan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perbadanan								15 Jenis	15 Jenis		
X	XX	01	2.06	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Badan	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Badan								6 Jenis	6 Jenis		
X	XX	01	2.06	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								20 Jenis	20 Jenis		
X	XX	01	2.06	0	Penyediaan Bahan Logistik Badan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Badan								12 kali	6 Kali		
X	XX	01	2.06	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								20 jenis	20 jenis		
X	XX	01	2.06	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								20 Koran	20 Koran		
X	XX	01	2.06	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								12 kali	6kali		

	1			2			3			4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X	XX	01	2.06	1	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								35 Jenis	35 Jenis	
X	XX	01	2.06	1	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								12 kali		
X	XX	01	2.07			Rengadahan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai								100%		
X	XX	01	2.07	0	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
X	XX	01	2.08	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik								12 Kali	6 Kali	
X	XX	01	2.08	0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Badan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Badan								1 Paket	1 Paket	
X	XX	01	2.08	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Badan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Badan								12 Bulan	6 Bulan	

1			2			3			4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X	XX	01	2.09	0	2	Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							1 roda empat dan 7 roda 2	1 roda empat dan 7 roda 2	
X	XX	01	2.09	0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Badan dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Badan dan Bangunan Lainnya							1 paket	1 paket	
X	XX	01	2.09	1	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Badan atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Badan atau Bangunan Lainnya							20 Jenis	20 Jenis	
XX	XX					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG										
8	01	02				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan							100%		

	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8 01 02 2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan penantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						100%		
8 01 02 2.01 0 2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						1 Kelurahan		
8 01 02 2.01 0 3		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah laporan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						1 kali & 540 orang		

	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8 01 03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik						100%		
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik	Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik						100%		
8 01 03 2.01			Jumlah laporan bahan Perumusan Kebijakan Pemantapan Situasi Politik Di Daerah								
8 01 03 2.01 0 2		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantapan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah laporan bahan Perumusan Kebijakan Pemantapan Situasi Politik Di Daerah								

1				2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8	01	04	2.01	0 3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					574 ormas		
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik (Sosial, ekonomidan Budaya)					100%		
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya					100%		
8	01	05	2.04	0 2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Perumusan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama					12 Dokumen		
8	01	05	2.04	0 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika					20 orang 69 Orang		

	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8	01	05	2.04	0					250 orang dan 12 kali	6 Kali	
8	01	06	2.01						100%		
8	01	06	2.01	0					30 perusahaan	30 perusahaan	

Renja Kesbangpol 2022

2022

1			2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8	01	06	2.01	0	4							
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Desa yang Mengadakan Pilkades Jumlah Pengamanan Hari-Hari Besar keagamaan Jumlah MTQ Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Jumlah rencana Aksi Terpadu					15 rencana aksi, 12 kali, 2 Hari Besar keagamaan dan 88 Desa	15 rencana aksi, 6 kali, 1 Hari Besar keagamaan	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor Tahun 20 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang (RPJMD) Tahun 2018 – 2023, target yang harus di upayakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang meliputi 4 (Empat) Indikator sebagai berikut :

1. TINGKAT CIPTA KONDISI KONDUSIF

a. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

- Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
 1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
 3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

b. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

- Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- c. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- d. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 1. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

2. TINGKAT BINA DEMOKRATISASI

- a. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
- Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
- b. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
- c. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

3. INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH**4. SAKIP PERANGKAT DAERAH**

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
SUMEDANG

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				n-2 2019 2018	N-1 2020 2019	n 2021 2020	N+1 2022 2021	2023	n-2 TAHUN 2019 (thn n) 2019	n-1 TAHUN 2020 (thn n + 1 2020)	TAHU N 2020 (thn n) 2021	TAHU N 2021 (thn n + 1 2022)	
2	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Tingkat Bina Demokratisasi		80,60 %	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	
4	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		1,00			7,00	25,00	50,00			7,00	25,00	
5	Sakip perangkat daerah		B	B	B	B	BB	A			B	BB	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara Nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD
2. Masih adanya potensi konflik di tingkat masyarakat dan elite Politik dalam proses penyelenggraan demokrasi
3. Adanya Pembangunan Proyekstrategis nasional Kabupaten Sumedang terutama pembangunan Waduk Jati Gede, Berbagai Bendung , Bandara Kerta Jati ,dan jalan Tol Cisumdawu. yang akan mengakibatkan terciptanya konflik di tingkat masyrakat misalnyatututan ganti rugi
4. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam memahami aspek demokrasi yang memberikan peluang luas terhadap masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah
5. **Koordinasi dengan instansi vertical yang baik** Dalam rangka penanganan berbagai hal koordinasi dengan instansi vertical tidak mengalami hambatan karena telah

terbangun sinergitas penguatan dan pengembangan jaringan yang terorganisir dengan baik dengan Pihak Kepolisian, Kodim, Kodam, Korem, BIN dan Kejaksaan

6. **Tingkat Partisipasi masyarakat kab. Sumedang terhadap proses demokrasi cukup tinggi** Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Tingkat Partisipasi masyarakat sebesar 78,45 % dan 78,75% dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 Tingkat Partisipasi masyarakat sebesar 80,62 % dan 80,60% dari gambaran data diatas terjadi kenaikan tingkat partisipasi Pilgub sebesar 2,17% dan Pilbup sebesar 1,85% sedangkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif Tahun 2014 sebesar 78,09% dan 80,22%
7. **Kondusifitas Daerah tetap terjaga** Berbagai Proses Demokrasi yang sudah dilaksanakan seperti Pilkada Serentak 2018, Pilkadaes Serentak Gelombang Kedua di 93 Desa dan Perayaan hari – hari besar keagamaan tidak memunculkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan Kondusifitas daerah dan tingkat kejahatan atau pelanggaran di wilayah Kabupaten Sumedang relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain serta unjuk rasa dari komponen masyarakat berlangsung secara damai tidak anarkis.
8. **Sinergitas Forkopimda dalam Penanganan Masalah** adanya dukungan dari tokoh tokoh baik dari pemerintah maupun masyarakat yang meliputi Forkopimda, Forkopimcam, Tiga Pilar (Kepala Desa, Babinsa dan Babin kamtibmas) Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat , Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Ormas dan OKP
9. Belum optimalnya forum-forum strategis (forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dll.)
10. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

11. Bermunculnya aliran-aliran sesat (pemahaman agama yang salah) Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi
12. Gangguan PEKAT masih tinggi
13. Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang Asing
14. Potensi Radikalisme dan terorisme masih ada
15. Belum optimal koordinasi dalam penanganan konflik social
16. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi
17. Peran ormas di masyarakat belum optimal
18. Belum optimalnya tim terpadu penanganan konflik social
19. Kesulitan pengecekan keabsahan badan hukum ormas
20. Belum terbentuknya sistem informasi ormas
21. Belum optimalnya penanganan potensi gangguan HAM
22. Sinergitas antar lembaga masih kurang
23. Belum optimalnya sosialisasi UU tentang pemilu, dan parpol
24. Belum optimalnya pendidikan politik
25. Belum optimalnya Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah Kabupaten Sumedang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022 terhadap Rancangan Awal RKPD pada pendanaan APBD Sebesar Rp. **7.056.985.970,00**, sebagai Berikut :

TABEL 2.3
 RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
 KABUPATEN SUMEDANG (APBD)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	
1	UNSUBUR PEMERINTAHAN UMMUM	3	4	5	6	UNSUBUR PEMERINTAHAN UMMUM	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi PerBadanan		2.368.339.970	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.228.900.484	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	13 Dokumen	26.485.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	13 dokumen	52.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	6.785.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	19.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan	1 dokumen	3.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	4.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3.800.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	4.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	3.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	25.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen perubahan DPA - SKPD	1 dokumen	3.800.000						
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	4.500.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	1.737.454.970	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	34 laporan	1.726.681.484	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 org	1.715.454.970	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	1.696.681.484	
8	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	8.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	10.000.000	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Administrasi	12 dok	13.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semester Tahun SKPD	11 dokumen	20.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100%	3.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	66 orang	7.219.000	
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32 stel		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33 orang	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	32 orang	3.500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	33 orang	7.219.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100%	464.830.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	12 Kali	533.000.000	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Badan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelayanan Administrasi PerBadanan	15 Jenis	4.999.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Badan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Badan	6 jenis	76.000.000	
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Badan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Badan	6 Jenis	115.190.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20 jenis	7.000.000	
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	6.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Badan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Badan	12 kali	100.000.000	
15	Penyediaan Bahan Logistik Badan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Badan	12 kali	125.760.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20 jenis	40.000.000	
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20 jenis	43.249.100	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20 koran	20.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20 Koran	19.499.400	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 kali	110.000.000	
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 kali	123.892.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35 jenis	30.000.000	
19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35 Jenis	26.240.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 paket	150.000.000	
20	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 kali							
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	1 paket	20.000.000	
21	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 paket	20.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100%	659.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	12 bulan	700.000.000	
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Kali	40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 kali	50.000.000	
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Badan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Badan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Badan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Badan	1 paket	30.000.000	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Badan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Badan	12 Bulan	589.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Badan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Badan	12 bulan	620.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100%	179.170.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	12 bulan	190.000.000	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 roda empat dan 7 roda 2	96.070.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	100.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Badan dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Badan dan Bangunan Lainnya	1 paket	43.480.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Badan dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Badan dan Bangunan Lainnya	1 paket	50.000.000	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Badan atau Bangunan Lainnya	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Badan atau Bangunan Lainnya	20 Jenis	39.620.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Badan atau Bangunan Lainnya	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Badan atau Bangunan Lainnya	12 bulan	40.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				3.986.046.000					4.335.000.000	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik hingga wawasan kebangsaan	100%	102.500.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik hingga wawasan kebangsaan	100%	130.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantauan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100%	102.500.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 kali	130.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Kelurahan	-	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Kelurahan	-	
29	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 kali & 540 orang	102.500.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah laporan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 kali 200 orang	130.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik	100%	1.171.246.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik	100%	1.057.205.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	1.171.246.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	12 Kali	1.057.205.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan bahan Perumusan Kebijakan Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		-	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan bahan Perumusan Kebijakan Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1 kali		
31	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	8 Parpol 8 rekomendasi	1.155.746.000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	9 bantuan	957.205.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kembangan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	16 Partai Politik, 12 kali dan 150 orang	15.500.000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kembangan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	4 kali	100.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas yang di bina	100%	105.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas yang di bina	100%	150.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	105.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	12 dokumen	150.000.000	
33	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	574 ormas	105.000.000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	574 Ormas	150.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial, ekonomi dan Budaya)	100%	412.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial, ekonomi dan Budaya)	100%	467.795.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	100%	412.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	12 dokumen	467.795.000	
34	Perumusan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan / Dokumen Perumusan Kebijakan di Bidang Fasilitas Kerukunan Umat Beragama	12 Dokumen	44.000.000	Perumusan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan / Dokumen Perumusan Kebijakan di Bidang Fasilitas Kerukunan Umat Beragama	12 dokumen	200.000.000	
35	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan / Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	20 orang 69 Orang	110.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan / Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	12 dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan / Dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250 orang dan 12 kali	258.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan / Dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 dokumen	267.795.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase potensi konflik tidak menjadi Kewaspadaan Nasional	100%	2.195.300.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100%	2.530.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	2.195.300.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 dokumen	2.530.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan / Dokumen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	30 perusahaan	34.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan / Dokumen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	12 dokumen	30.000.000	
38	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang Mengadakan Pilkades Jumlah Pengamanan Hari-Hari Besar keagamaan Jumlah Pengamanan MTTQ Jumlah Peserta Jumlah Rapat Koordinasi Jumlah rencana Aksi Terpadu	15 rencana aksi, 12 kali, 2 Hari Besar keagamaan dan 88 Desa	2.161.300.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rencana Aksi Terpadu, Jumlah Rapat Koordinasi, Jumlah Pengamanan Hari-Hari Besar keagamaan dan Jumlah Desa yang Mengadakan Pilkades	1 kali 55 orang 12 Kali 15 Rencana Aksi 1 kali 88 Desa	2.500.000.000	
J U M L A H					7.056.985.970,00					7.563.900.484	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2022 Merupakan Rencana Kerja penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan Badan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TABEL 2.4

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KABUPATEN SUMEDANG APBD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG**

KODE REKENING 1	SUB KEGIATAN 2	JUMLAH 3
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	707.946.500,00
	Forum Operator Perangkat Daerah	150.000.000,00
	HIPKADA	102.922.500,00
	JPKP	455.024.000,00
8.01.03.2.01.03	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.571.973.500,00
	KPU	1.644.743.000,00
	DEMOKRAT	59.743.500,00

KODE REKENING 1	SUB KEGIATAN 2	JUMLAH 3
	GERINDRA	140.329.500,00
	PAN	79.434.000,00
	GOLKAR	136.900.000,00
	PDI P	199.540.500,00
	PKB	84.574.500,00
	PKS	93.622.500,00
	PPP	133.086.000,00
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	404.000.000,00
	FKUB	404.000.000,00
	JUMLAH	3.683.920.000,00

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
KABUPATEN SUMEDANG APBD PROVINSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG**

Kode		Urusan Bidang Pemerintahan Daerah /Program /Kegiatan/Sub Kegiatan /Rincian Sub Kegiatan	APBD Prov	Jumlah (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
X	XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000	100.000.000
X	XX 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000	100.000.000
		Sarana dan Prasarana Penunjang Tupoksi Kesbangpol	100.000.000,00	100.000.000,00
XX	XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	300.000.000	300.000.000
8	01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100.000.000	100.000.000
8	01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100.000.000	100.000.000

Kode				Urusan Bidang Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rincian Sub Kegiatan	APBD Prov	Jumlah (Rp)
(1)				(2)	(3)	(4)
8	01	02	2.01	03 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.000.000	100.000.000
				Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan	100.000.000,00	100.000.000,00
8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100.000.000	100.000.000
8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100.000.000	100.000.000
8	01	04	2.01	03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000	100.000.000

Kode				Urusan Bidang Pemerintahan Daerah /Program /Kegiatan /Sub Kegiatan /Rincian Sub Kegiatan	APBD Prov	Jumlah (Rp)
(1)				(2)	(3)	(4)
				Pendataan dan Verifikasi Keberadaan Ormas di Jawa Barat	100.000.000,00	100.000.000,00
8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	100.000.000	100.000.000
8	01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	100.000.000	100.000.000
8	01	05	2.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.000.000	100.000.000
				Pengumpulan Data dan Informasi Sikonda Jawa Barat	100.000.000,00	100.000.000,00
					400.000.000	400.000.000

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan
Prioritas Pembangunan Nasional**

Sebagai implementasi Nawa Cita, maka dalam aspek politik dan demokrasi terus dimantapkan dan ditingkatkan implementasi penguatan lembaga-lembaga demokrasi, termasuk penguatan lembaga kepresidenan, peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu, penyempurnaan peraturan perundangan kepeiluan, parpol dan ormas, serta mendorong peningkatan peran kelompok marjinal termasuk peran perempuan dalam politik

Arah kebijakan dan strategi pada RPJMN tahun 2015-2019 yaitu Meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat, dengan strategi pembangunan yang akan ditempuh antara lain adalah penerapan kebijakan *affirmative action kepada* kelompok marjinal; peningkatan kapasitas kelompok perempuan; penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya; pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal; pengembangan pusat pendidikan pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif; penguatan fungsi pendidikan politik oleh parpol.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Program yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Sumedang Sebagai Berikut:

- a. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
 1. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
 - a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi

Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
- c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

b. PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

c. PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- d. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
 - 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
- e. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
 - 1. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
 - c. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

**IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
KABUPATEN SUMEDANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG**

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
A	Nasional		
1	Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	RKP TAHUN 2022	
2	Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	RKP TAHUN 2022	
B	Provinsi		
1	Program Kesatuan Bangsa dan Politik	RKPD PROV JABAR TAHUN 2022	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

tujuan

Sesuai tugas Pokok dan fungsi serta melihat dan mencermati latar belakang dan fenomena- fenomena saat ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Tujuan sebagai berikut :

**“TERCIPTANYA KABUPATEN SUMEDANG
YANG KONDUSIF DAN DEMOKRATIS”.**

Tujuan diatas, secara umum mengandung makna terciptanya Masyarakat Sumedang yang Kondusif dan Demokratis guna mendukung lancarnya pelaksanaan berbagai program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan makna secara harfiah adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat
- 2) Tingkat partisipasi dalam mendukung proses demokrasi

Tujuan penetapan di maksud adalah guna mencapai hal-hal sebagai berikut:

- (1) Sebagai cermin apa yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
- (2) Sebagai cermin dalam memberikan arah dan fokus strategis yang jelas terhadap resfek kerja dan unjuk kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap layanan masyarakat Kabupaten Sumedang.
- (3) Sebagai itikad dalam optimalisasi potensi yang ada terhadap kinerja masa depan.

sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dijabarkan, *sebagai berikut*;

- 1) Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat melalui sosialisasi
- 2) Koordinasi lintas instansi dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat
- 3) Meningkatkan pemahaman masyarakat atas proses politik
- 4) Meningkatkan keterlibatan ormas dalam kegiatan pembangunan daerah dan kemasyarakatan
- 5) Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah
- 6) Membangun hubungan yang harmonis dan manusiawi di antara pegawai dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik guna terwujudnya kualitas sumberdaya manusia yang terampil, mandiri dan berakhlak mulia.

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikator (Rp)			Jumlah (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2023 (Rp)		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target	Target	Target			APBD Kab	APBD Prov
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Perbadanan	100%	Perentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100%	13 Dokumen	52.000.000	3.400.485.966	100.000.000	-	3.500.485.966	3.860.266.966,00
X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kesbangpol Sumedang			Perentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD		3 dokumen	10.000.000				10.000.000	20.000.000,00
X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kesbangpol Sumedang			Perentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD		1 dokumen	4.000.000				4.000.000	7.000.000,00

	(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
X	XX	01	2.01	03										
X	XX	01	2.01	04										
X	XX	01	2.01	05										
X	XX	01	2.01	06										
X	XX	01	2.02											

	(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
X	XX	01	2.02	01					Persentase Kesesuaian Laporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah	15 org	1.868.266.966		1.868.266.966	1.868.266.966
X	XX	01	2.02	05					Persentase Kesesuaian Laporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah	1 dok	10.000.000		10.000.000	20.000.000,00
X	XX	01	2.02	07					Persentase Kesesuaian Laporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah	12 dok	20.000.000		20.000.000	30.000.000,00
X	XX	01	2.05							100%	27.219.000		27.219.000	94.000.000
X	XX	01	2.05	02						32 stel	20.000.000		20.000.000	25.000.000
X	XX	01	2.05	03						32 orang	7.219.000		7.219.000	9.000.000

	(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
X	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Badan kesbangpol Sumedang								60.000.000
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi PerBadanan	100%	100%	558.000.000	-	-	558.000.000	730.000.000
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Badan	Badan kesbangpol Sumedang				6.000.000			6.000.000	7.000.000
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Badan	Badan kesbangpol Sumedang				70.000.000			70.000.000	130.000.000
X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Badan kesbangpol Sumedang				7.000.000			7.000.000	8.000.000
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Badan	Badan kesbangpol Sumedang				100.000.000			100.000.000	120.000.000
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan kesbangpol Sumedang				40.000.000			40.000.000	70.000.000
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan kesbangpol Sumedang				20.000.000			20.000.000	30.000.000

	(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
X	XX	01	2.06	09											
X	XX	01	2.06	10											
X	XX	01	2.06	11											
X	XX	01	2.07												
X	XX	01	2.07	02											
X	XX	01	2.08												
X	XX	01	2.08	03											

	(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Badan	Badan kesbangpol Sumedang								
X	XX	01	2.09	02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparaturnya	100%						
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan kesbangpol Sumedang								
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Badan dan Bangunan Lainnya	Badan kesbangpol Sumedang								
X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Badan atau Bangunan Lainnya	Badan kesbangpol Sumedang								
					Sarana dan Prasarana Penunjang Tupoksi kesbangpol									
XX	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG									
8	01	02			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik hingga wawasan kebangsaan	100%							

	(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Kemah Pembauran Kebangsaan						Jumlah Peserta	50 orang	75.000.000			75.000.000	150.000.000
		Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan						Jumlah Peserta	50 orang		100.000.000,00		100.000.000,00	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik	100%	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	12 kali			1.012.246.000			1.012.246.000	1.027.246.000
8	01	03	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kembangan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1.012.246.000			1.012.246.000	1.027.246.000

	(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8	01	04	2.01				Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	12 kali		400.000.000	100.000.000	-	500.000.000	830.000.000
							Jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pembudayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 kali		400.000.000	100.000.000	-	500.000.000	830.000.000
								1. Jumlah Ormas yang diawasi 2. Jumlah Ormas yang divalidasi 3. Jumlah Ormas yang di bina		50.000.000			50.000.000	70.000.000
								Jumlah Ormas	50 ormas	75.000.000			75.000.000	150.000.000
								Jumlah Ormas	50 ormas	75.000.000			75.000.000	150.000.000
								Jumlah Ormas	50 ormas	75.000.000			75.000.000	150.000.000

(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)						Tingkat Kerukunan	1 kali	250.000.000			250.000.000	275.000.000
	Survei Index Kerukunan Umat Beragama						Tingkat Kerukunan	1 kali	550.000.000			550.000.000	600.000.000
	Kesekretariatan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB)											200.000.000	200.000.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				Jumlah Laporan / Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	1 kali			50.000.000			50.000.000	70.000.000
	Sosialisasi P4GN				Jumlah Laporan / Dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Peserta	26 orang	50.000.000			50.000.000	70.000.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				Jumlah Laporan / Dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 kali			150.000.000	100.000.000		650.000.000	650.000.000
	Perve lenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah					Jumlah rapat		12 Kali	150.000.000			150.000.000	250.000.000

	(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Pembentukan dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Sumedang											200.000.000	200.000.000
		Kesekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)											200.000.000	200.000.000
		Pengumpulan Data dan Informasi Sikonda Jawa Barat									100.000.000,00		100.000.000,00	
8	01	06		PROGRAM PENGINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENGINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGKAWAN KONFLIK SOSIAL			100%	100%	100%	3.163.800.000			3.163.800.000	4.510.000.000
				Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional				Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100%	3.163.800.000			3.163.800.000	4.510.000.000
8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 kali	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100%	3.163.800.000			3.163.800.000	4.510.000.000

(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Hari-hari Besar Keagamaan						Jumlah Pengamanan Hari-Hari Besar keagamaan	2 Hari Besar keagamaan	500.000.000			500.000.000	1.100.000.000
	Bintek Intelijen						Jumlah Peserta	55 orang	100.000.000			100.000.000	170.000.000
	Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) MTO						Jumlah Pengamanan MTO	1 kali	1.000.000.000			1.000.000.000	1.000.000.000
									9.186.531.966	400.000.000	-	10.386.531.966	12.592.512.966

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Pendanaan Daerah Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022
KABUPATEN SUMEDANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG**

No	Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100%	130.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 kali	130.000.000
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Kelurahan	-
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah laporan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 kali 200 orang	130.000.000
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik	100%	1.057.205.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	12 Kali	1.057.205.000

No	Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6
3	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan bahan Perumusan Kebijakan Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1 kali	
4	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	9 bantuan	957.205.000
5	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	4 kali	100.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas yang di bina	100%	150.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	12 dokumen	150.000.000
6	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	574 Ormas	150.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial, ekonomi dan Budaya)	100%	467.795.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	12 dokumen	467.795.000

No	Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6
7	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Kepercayaan di Daerah Beragama dan Penghayat	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan / Dokumen Perumusan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	12 dokumen	200.000.000
8	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan / Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	12 dokumen	
9	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan / Dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 dokumen	267.795.000
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100%	2.530.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 dokumen	2.530.000.000
10	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan / Dokumen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	12 dokumen	30.000.000

Hasil Analisa Kebutuhan					
No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6
11	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rencana Aksi Terpadu, Jumlah Rapat Koordinasi, Jumlah Pengamanan Hari-Hari Besar keagamaan dan Jumlah Desa yang Mengadakan Pilkades	1 kali 55 orang 12 Kali 15 Rencana Aksi 1 kali 88 Desa	2.500.000.000
j u m l a h					7.563.900.484

BAB V PENUTUP


Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022 ini akan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya. Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumedang tahun 2021 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur di lingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik dan dukungan pihak lain yang berkepentingan.

Dalam kaitan itu, seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan dukungan pihak- pihak yang terkait, perlu bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun 2022 agar mampu memberikan output dan hasil sesuai dengan harapan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang. Guna pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Renja ini, seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan.

Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun 2022 merupakan acuan bagi aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumedang, sehingga dapat bersinergi dalam pelaksanaannya

Demikian, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumedang tahun 2021 agar yang berkepentingan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab

Sumedang, 30 Desember 2021
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang



Drs. H. ASER TATANG SUJANA., M.Si
NIP. 19660228 199901 1 001